

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Dari rumusan masalah analisis To Do list modul asset tetap pada aplikasi MonSAKTI diatas penulis menggunakan 6 item sistem. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dibentuk untuk mentransformasikan data keungan yang dan data yang lain menjadi sebuah informasi (Mulyani, 2009). Informasi yang dihasilkan akan digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan dengan fungsinya secara manual dan komputerisasi. Pada system informasi akuntansi manajemen seluruh data organisasi baik data keungan ataupun nonkeuangan, dikelola untuk dijadikan informasi bagi seluruh tingkatan manajemen dalam membantu pengambilan keputusanya. Sistem- system yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

#### 2.1 SAKTI

Menurut peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia, Sakti adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian pengelolaan keuangan negara (PMK No. 159, 2018). SAKTI merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. SAKTI mempunyai fungsi utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SAKTI terdiri dari dari beberapa modul (menu), yaitu modul administrasi, penganggaran, komitmen bendahara, pembayaran, persediaan, aset tetap, piutang, dan modul general ledger dan pelaporan (GLP). Selain itu, SAKTI juga menerapkan konsep single database dan ber-interface dengan SPAN pada setiap tahap siklus anggaran. Fitur yang ada pada aplikasi SAKTI yaitu *Integrasi Database, Single Entry Point, Multi User Multi Satker, Level User (Maker, Checker, dan Approver), penerapan Access Control List (ACL), kompatibilitas dengan SPAN, basis akuntansi akrual secara Transaksional, Open-Closing Period, Locking Transaksi*, terdapat 14 Periode Akuntansi

*(Unaudited dan Audited), ADK Interface (Encrypted, Hashed, PIN) dan Historical dan Log Data*

## **2.2 MonSAKTI**

MonSakti sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan secara voluntary oleh instansi/satuan kerja pengelola dana APBN yang menggunakan Aplikasi SAKTI (Marpaung, 2021) Sama seperti SAKTI, sejauh ini aplikasi MonSakti diakses melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan intranet Kementerian Keuangan. Dalam penggunaannya, MonSakti memiliki manfaat antara lain; sebagai pengawasan dan pengendalian internal satuan kerja (dilakukan oleh satuan kerja), monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dan Bendahara Umum Negara (dilakukan oleh DJPb selaku BUN dan satuan kerja), serta monitoring dan evaluasi sistem aplikasi SAKTI (dilakukan oleh subdirektorat PSIE Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) DJPb). Aplikasi MonSakti memiliki dua fungsi utama yaitu; Fungsi monitoring aplikasi SAKTI dan fungsi pengawasan.

Fungsi monitoring MonSakti mencakup; monitoring efektifitas penggunaan anggaran, monitoring penerimaan Negara (mencakup penerimaan potongan pajak atas beban APBN), rekonsiliasi laporan keuangan secara otomatis, monitoring transaksi pembayaran secara real-time, monitoring pelaksanaan kontrak sesuai dengan time line, monitoring transaksi bendahara secara real-time, serta monitoring transaksi asset dan persediaan secara real-time. Sedangkan, fungsi pengawasan Monsakti antara lain; 1) pengawasan terhadap realisasi yang melebihi jumlah pagu anggaran (pagu minus), 2) pengawasan terhadap Kas Tunai Bendahara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.05/2016, disebutkan bahwa jumlah kas tunai bendahara di akhir hari adalah kurang lebih lima puluh juta rupiah kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. 3) Pengawasan terhadap tutup periode (closing period) setiap bulannya, 4) Pengawasan terhadap kewajiban satuan kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) segera setelah membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP). 5) Pengawasan terhadap adanya duplikasi pejabat perbendaharaan. 6)

pengawasan terhadap kewajiban satuan kerja untuk segera membayar kontrak yang telah selesai. 6) Pengawasan untuk kewajiban satuan kerja segera mengunggah nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). serta, 7) Pengawasan kepada kewajiban satuan kerja untuk melakukan mencatat detail (register) Aset dan Persediaan.

### 2.3 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi internal melibatkan pencocokan data dalam penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023, 2023). Tujuan dari rekonsiliasi internal adalah memastikan keandalan dan keakuratan data keuangan di dalam unit kerja. Untuk mencapai tujuan rekonsiliasi maka diperlukan penyelesaian *to do list*. *To do list* merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pelaporan data keuangan dan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang efektif untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan pelaporan data keuangan oleh Satker atau Satuan Kerja. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana penyelesaian rekonsiliasi internal *to do list* pada aplikasi MonSAKTI dalam penyajian kualitas data laporan keuangan.

### 2.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh secara struktual, siap digunakan dalam operasional suatu perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan usaha normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lain-lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap.

Perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap.

## **2.5 RK Aset belum RM**

Reklasifikasi keluar aset yang belum disertai dengan reklasifikasi masuk merujuk pada situasi di mana suatu aset telah direklasifikasi atau dipindahkan dari satu kategori, lokasi, atau unit organisasi ke kategori, lokasi, atau unit lain, tetapi belum sepenuhnya tercatat di tempat tujuan baru. Ini bisa terjadi ketika aset, misalnya, dipindahkan dari kategori aset tetap ke aset tak berwujud, atau dari satu divisi ke divisi lain, namun proses pencatatan di kategori atau lokasi baru belum selesai atau belum dilakukan.

Akibatnya, dalam laporan keuangan atau sistem manajemen aset, terjadi ketidaksesuaian di mana aset tersebut tidak lagi tercatat di lokasi asalnya, tetapi juga belum terlihat di lokasi atau kategori baru. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pelacakan aset, mengurangi transparansi, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan atau audit. Untuk menghindari masalah ini, penting untuk memastikan bahwa reklasifikasi aset dilakukan secara lengkap dan sinkron antara tempat asal dan tujuan.

## **2.6 TK Aset belum TM**

Transfer keluar aset yang belum disertai dengan transfer masuk mengacu pada situasi di mana suatu aset telah dicatat sebagai keluar atau dipindahkan dari satu unit, departemen, atau lokasi, tetapi belum dicatat sebagai diterima atau masuk di unit, departemen, atau lokasi tujuan. Dalam istilah sederhana, ini berarti aset telah dikeluarkan dari catatan di tempat asalnya, tetapi belum diakui atau diregistrasi di tempat baru yang seharusnya menerima aset tersebut.

Situasi ini dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk:

- 1) Ketidakakuratan Catatan Aset: Aset mungkin tampak hilang atau tidak tercatat dengan benar, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pelacakan aset.

- 2) **Kesalahan Pelaporan Keuangan:** Dalam laporan keuangan, aset mungkin tidak tercatat pada lokasi atau kategori yang benar, yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat.
- 3) **Risiko Hilangnya Aset:** Tanpa pencatatan yang tepat, ada risiko bahwa aset dapat hilang atau dicuri tanpa terdeteksi.
- 4) **Hambatan Operasional:** Ketidakjelasan dalam posisi aset dapat menghambat operasi harian, terutama jika aset tersebut penting untuk fungsi tertentu.